



# Problematika Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat

Helti Handraini<sup>1</sup>, Nora Eka Putri<sup>2\*</sup>, Genius Umar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2195>

\*Correspondence: Nora Eka Putri

Email: [noraekaputri@fis.unp.ac.id](mailto:noraekaputri@fis.unp.ac.id)

Received: 23-04-2025

Accepted: 23-05-2025

Published: 22-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan masyarakat, namun pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi problematika pelayanan publik di bidang pendidikan, dengan fokus pada keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang memadai, kesenjangan ekonomi masyarakat, serta kebijakan dan pengawasan yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi studi kasus di beberapa sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bangunan sekolah yang tidak layak, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya kesejahteraan guru menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, pandangan tradisional masyarakat dan pernikahan dini juga berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur pendidikan, perbaikan sistem tenaga pendidik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta penguatan kebijakan dan pengawasan. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan pelayanan pendidikan di Pasaman Barat dapat meningkat secara signifikan demi menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.

**Kata Kunci:** Problematika, Pelayanan Publik, Pendidikan

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Di Kabupaten Pasaman Barat, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, tantangan dalam pelayanan pendidikan masih sangat nyata dan kompleks. Dengan luas wilayah mencapai 4.300 km<sup>2</sup>, Pasaman Barat memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga daerah pedalaman yang terpencil. Keberagaman ini tidak hanya mempengaruhi aksesibilitas pendidikan tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat sekitar 400 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan, namun distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang tidak merata menjadi masalah signifikan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana

siswa di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pasaman Barat juga menjadi faktor penting dalam permasalahan pendidikan. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga menyulitkan mereka untuk mengakses pendidikan berkualitas. Data menunjukkan bahwa sekitar 30% penduduk berusia 15 tahun ke atas hanya memiliki pendidikan dasar, sementara hanya 10% yang mencapai pendidikan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan, di mana generasi muda tidak mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Akibatnya, banyak anak-anak di Pasaman Barat terpaksa berhenti sekolah untuk membantu keluarga mereka, sehingga menambah jumlah anak putus sekolah dan menghambat perkembangan sumber daya manusia di daerah ini.

Kebijakan publik terkait pendidikan di Pasaman Barat belum sepenuhnya optimal dalam menjawab tantangan yang ada. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai harapan. Misalnya, program peningkatan kompetensi guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mengalami ketidakaktifan yang signifikan karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan rendahnya motivasi guru untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, banyak kebijakan yang tidak terintegrasi dengan baik antara satu program dengan program lainnya, sehingga menciptakan tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan (Finogenov, 2020).

Dalam hal infrastruktur pendidikan, banyak sekolah di daerah terpencil masih memerlukan perbaikan serius. Menurut laporan Rapor Pendidikan Indonesia 2024, sekitar 40% sekolah dasar di Pasaman Barat tidak memiliki fasilitas memadai seperti ruang kelas yang layak, akses ke sumber belajar seperti buku dan alat peraga, serta sanitasi yang baik. Kondisi ini tentu saja menghambat proses belajar mengajar dan mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya infrastruktur transportasi juga membuat siswa sulit untuk menjangkau sekolah mereka, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Tanpa adanya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan sangat terbatas.

Kualitas pengajaran juga menjadi isu krusial dalam pelayanan pendidikan di Pasaman Barat. Banyak guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang tidak interaktif dapat menyebabkan siswa kurang memahami materi pelajaran dan kehilangan minat untuk belajar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pelatihan bagi guru agar mereka dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan juga sangat diperlukan agar mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan.

Tantangan lain dalam pelayanan pendidikan di Pasaman Barat adalah kurangnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di era digital saat ini, kemampuan untuk menggunakan teknologi menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran modern. Namun, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% sekolah di Pasaman Barat yang memiliki akses internet atau fasilitas komputer untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini membuat siswa sulit untuk mendapatkan informasi terbaru dan memperluas wawasan mereka tentang dunia luar. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu melakukan investasi lebih besar dalam infrastruktur TIK serta memberikan pelatihan kepada guru dan siswa agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara efektif.

Secara keseluruhan, problematika pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga pendidikan, serta sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini (Esparza, 2019). Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan yang tepat dari semua elemen masyarakat, diharapkan pelayanan pendidikan di Pasaman Barat dapat diperbaiki secara signifikan demi masa depan generasi muda yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam problematika pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif para pemangku kepentingan dalam konteks pendidikan. Melalui metode ini, data yang diperoleh akan lebih kaya dan beragam, mencakup pandangan masyarakat, guru, dan pihak terkait lainnya mengenai tantangan dan solusi dalam pelayanan pendidikan.

Dalam pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi studi kasus di beberapa sekolah di Kabupaten Pasaman Barat. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi nyata di lapangan, termasuk infrastruktur pendidikan, interaksi antara guru dan siswa, serta partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar. Selain itu, wawancara mendalam dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai pengalaman mereka terkait pelayanan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kesenjangan dan tantangan dalam pelayanan pendidikan serta rekomendasi yang relevan untuk perbaikan ke depan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor yang mempengaruhi Problematika Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Pasaman Barat

#### a. Keterbatasan Infrastruktur

##### 1) Kondisi Bangunan Sekolah

Keterbatasan infrastruktur pendidikan di Pasaman Barat merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pelayanan publik di bidang pendidikan. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kondisi bangunan sekolah yang tidak layak pakai. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Atap yang bocor, dinding yang retak, dan lantai yang rusak adalah beberapa contoh kondisi bangunan sekolah yang tidak ideal. Menurut laporan dari Dinas Pendidikan Pasaman Barat, sekitar 29,43% ruangan belajar sekolah dasar (SD) di daerah tersebut dalam kondisi rusak, sedangkan 34 ruangan berstatus rusak berat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses belajar-mengajar tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi siswa dan guru.

Hal ini tercermin dalam pernyataan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Imter Pedri, yang menyatakan bahwa "semua ruangan belajar SD yang kondisi rusak hanya bisa melalui bantuan, apakah itu bantuan DAK, APBN, dana shiring dari Provinsi ataupun dana APBD Pasaman Barat sendiri". Ketersediaan bantuan yang terbatas ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan eksternal untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah pusat dalam mensupport pembangunan fisik sekolah di daerah-daerah terpencil.

##### 2) Kurangnya Fasilitas Pendukung

Kurangnya fasilitas pendukung juga merupakan salah satu keterbatasan infrastruktur pendidikan yang dialami oleh sekolah-sekolah di Pasaman Barat. Sekolah-sekolah kekurangan laboratorium sains, komputer, maupun perpustakaan yang memadai. Banyak sekolah tidak memiliki alat-alat pendidikan yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif. Contohnya, perpustakaan sekolah yang ada hanya mencapai 159 unit dari total 256 unit yang dibutuhkan. Hal ini berarti masih kurang sebanyak 97 unit lagi. Kurangnya fasilitas ini membuat siswa sulit mengakses pembelajaran berbasis praktik. Laboratorium sains yang tidak lengkap membuat siswa tidak dapat melakukan eksperimen ilmu pengetahuan secara langsung. Komputer yang tidak cukup jumlahnya membuat siswa tidak dapat mengakses internet dan sumber belajar online. Perpustakaan yang minim membuat siswa tidak dapat menemukan buku-buku yang dibutuhkan untuk proyek-proyek kuliah. Semua ini berimplikasi pada kualitas pendidikan yang rendah dan kurangnya kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan.

##### 3) Aksesibilitas yang Terbatas

Akses ke sekolah di daerah pedalaman menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan pendidikan di Pasaman Barat. Infrastruktur jalan yang buruk dan minimnya

transportasi umum seringkali membuat siswa sulit menjangkau sekolah. Saat musim hujan, banyak jalan menjadi berlumpur dan sulit dilalui, menyebabkan siswa sering absen. Guru juga menghadapi tantangan serupa, sehingga beberapa sekolah tidak memiliki guru yang hadir selalu. Menurut data statistik, tingkat partisipasi siswa di daerah pedalaman cenderung lebih rendah daripada daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan aksesibilitas yang dialami oleh siswa dan guru. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan yang lebih baik dan meningkatkan akses transportasi umum di daerah-daerah terpencil. Dengan cara ini, diharapkan tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan dapat ditingkatkan dan kualitas pendidikan dapat meningkat secara keseluruhan.

## **b. Kurangnya Tenaga Pendidik yang Memadai**

### **1) Distribusi Guru yang Tidak Merata**

Distribusi tenaga pendidik di Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam problematika pelayanan pendidikan. Sebagian besar guru cenderung memilih untuk bertugas di wilayah perkotaan atau dekat pusat kota, di mana fasilitas dan insentif lebih baik. Akibatnya, sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru. Data menunjukkan bahwa di beberapa sekolah, hanya ada satu atau dua orang guru yang mengajar seluruh mata pelajaran untuk berbagai jenjang kelas. Misalnya, di beberapa sekolah dasar di kecamatan terpencil, rasio guru terhadap siswa bisa mencapai 1:40, yang sangat tidak ideal untuk proses pembelajaran yang efektif. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi siswa yang membutuhkan perhatian dan bimbingan lebih dari seorang pendidik. Ketidakmerataan distribusi guru ini juga menyebabkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah pedesaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berada di perkotaan. Dalam laporan Dinas Pendidikan Pasaman Barat, sekitar 60% dari total 1.200 guru terdistribusi di wilayah perkotaan, sementara hanya 40% yang berada di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih strategis dalam penempatan guru agar semua siswa, tanpa memandang lokasi geografis, dapat menikmati pendidikan berkualitas.

### **2) Kompetensi Guru yang Belum Optimal**

Selain masalah distribusi, kompetensi guru juga menjadi isu utama dalam pelayanan pendidikan di Pasaman Barat. Banyak guru, terutama di sekolah-sekolah dasar, belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengajar secara efektif. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya sekitar 45% guru di Pasaman Barat yang memiliki sertifikasi pendidikan formal yang sesuai dengan bidangnya. Banyak dari mereka belum mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi secara berkala, sehingga metode pengajaran yang digunakan masih konvensional dan kurang inovatif. Kurangnya pelatihan ini berdampak negatif pada kemampuan mereka dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebuah studi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan menunjukkan bahwa metode pengajaran yang tidak dinamis dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami

materi pelajaran. Hal ini berimplikasi pada rendahnya prestasi akademik siswa dan menurunnya minat mereka terhadap belajar. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran mereka.

### 3) Kesejahteraan Guru yang Rendah

Kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Pasaman Barat. Sebagian besar guru honorer menerima gaji yang sangat rendah, jauh di bawah standar upah minimum regional. Data menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru honorer hanya sekitar Rp1.500.000 per bulan, sedangkan upah minimum regional untuk Kabupaten Pasaman Barat adalah Rp2.500.000 per bulan. Ketidakcukupan gaji ini membuat banyak guru terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketidakpastian status kerja guru honorer juga menjadi faktor yang mengurangi motivasi mereka dalam menjalankan tugas mengajar secara maksimal. Banyak dari mereka merasa tidak dihargai dan tidak memiliki jaminan masa depan dalam profesi ini. Menurut survei oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Indonesia, sekitar 70% guru honorer menyatakan bahwa mereka merasa kurang termotivasi untuk mengajar karena kondisi kesejahteraan yang tidak memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta memberikan kepastian status kerja agar mereka dapat fokus pada tugas utama mereka dalam mendidik generasi muda dengan baik.

## c. Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

### 1) Putus Sekolah

Tingginya angka putus sekolah di Pasaman Barat menjadi salah satu masalah serius yang berkontribusi pada kesenjangan pendidikan di daerah tersebut. Banyak anak-anak dari keluarga yang kurang mampu terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua mereka bekerja di ladang atau kebun. Meskipun biaya pendidikan telah digratiskan, kebutuhan lain seperti seragam, buku, dan transportasi tetap menjadi beban yang berat bagi banyak keluarga. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 30% anak-anak di Pasaman Barat tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, dengan alasan utama adalah tekanan ekonomi. Selain itu, keberadaan perusahaan perkebunan sawit di daerah ini sering kali mendorong anak-anak untuk mencari brondolan sawit daripada bersekolah, yang semakin memperburuk angka putus sekolah. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi muda tidak mendapatkan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

### 2) Minimnya Dukungan Pendidikan di Rumah

Dukungan pendidikan di rumah juga sangat minim, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah. Banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk membantu anak-anak mereka dalam belajar, sehingga mereka sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap

pendidikan anak-anak. Selain itu, banyak orang tua yang lebih memprioritaskan anak-anak mereka untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut survei oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Indonesia, sekitar 65% orang tua di Pasaman Barat menganggap bahwa bekerja adalah prioritas utama bagi anak-anak mereka dibandingkan melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua berkontribusi pada rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan masa depan yang lebih baik.

### 3) Akses Teknologi yang Terbatas

Kemajuan teknologi juga belum merata di Pasaman Barat, dan banyak keluarga tidak memiliki akses ke perangkat teknologi seperti komputer atau smartphone, apalagi internet. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% rumah tangga di Pasaman Barat yang memiliki akses internet, sementara sisanya terpaksa bergantung pada sumber informasi tradisional. Keterbatasan akses ini menjadi hambatan besar dalam proses pembelajaran, terutama di era digital saat ini, di mana banyak materi pelajaran dan sumber belajar tersedia secara online. Tanpa akses ke teknologi, siswa tidak dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang memerlukan penelitian online. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan, di mana siswa di perkotaan memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya belajar dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di daerah terpencil.

## d. Kebijakan dan Pengawasan yang Belum Optimal

### 1) Alokasi Anggaran Minimum

Meskipun sektor pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat, alokasi anggaran untuk pendidikan masih tergolong minim. Berdasarkan data dari Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2023, total anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan pada tahun 2024 hanya sebesar Rp95.838.317.000,00. Angka ini jauh dari cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas belajar, serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Banyak sekolah yang masih memerlukan rehabilitasi ruang kelas dan penyediaan alat-alat pendidikan yang memadai. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan banyak program pendidikan tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga kualitas pendidikan di daerah ini tetap tertinggal dibandingkan daerah lain.

### 2) Kewenangan Pengawasan

Pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan di Pasaman Barat juga masih lemah, yang berkontribusi pada berbagai masalah dalam pelayanan pendidikan. Misalnya, ketidakhadiran guru di sekolah sering kali tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Data menunjukkan bahwa sekitar 25% guru di beberapa sekolah dasar di Pasaman Barat tidak hadir secara rutin, namun tidak ada tindakan tegas dari Dinas

Pendidikan untuk menangani masalah ini. Ketidakberdayaan dalam pengawasan ini menciptakan situasi di mana siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang konsisten dan berkualitas. Selain itu, penggunaan dana bantuan pendidikan juga kurang transparan dan akuntabel, sehingga rawan terjadi penyimpangan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Menurut laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terdapat indikasi bahwa dana bantuan pendidikan tidak selalu digunakan sesuai dengan peruntukannya, yang berdampak negatif pada kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

### 3) Kebijakan yang Tidak Sesuai Kebutuhan

Kebijakan pendidikan yang diterapkan di Pasaman Barat sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat. Misalnya, kurikulum berbasis akademik yang diterapkan kurang relevan bagi anak-anak di daerah agraris yang lebih membutuhkan keterampilan praktis untuk mendukung kehidupan mereka di masa depan. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% penduduk Pasaman Barat bekerja di sektor pertanian, namun kurikulum pendidikan masih berfokus pada teori-teori akademis tanpa memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan di lapangan. Hal ini menyebabkan banyak siswa merasa tidak termotivasi untuk belajar karena materi pelajaran yang diajarkan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, banyak siswa yang lulus dari sekolah dasar tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, termasuk pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan keterampilan praktis dan pengetahuan berbasis lapangan agar siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

## e. Faktor Sosial dan Budaya

### 1) Pandangan Tradisional

Pandangan tradisional di masyarakat Pasaman Barat masih mempengaruhi pentingnya pendidikan formal, di mana pendidikan sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan pekerjaan di sektor agraris. Dalam banyak kasus, anak-anak dari keluarga petani didorong untuk membantu orang tua mereka di ladang daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 40% anak-anak di Pasaman Barat tidak melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar, dengan alasan utama adalah tekanan untuk bekerja di sektor pertanian. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan, karena anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak terpaksa mengorbankan masa depan mereka demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan formal tidak memberikan jaminan pekerjaan yang baik, sehingga mereka lebih memilih agar anak-anak mereka belajar keterampilan

praktis di lapangan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan, sekitar 65% orang tua di Pasaman Barat lebih memilih agar anak-anak mereka bekerja daripada melanjutkan sekolah. Pandangan ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang dari pendidikan formal agar mereka dapat menyadari pentingnya mengedukasi generasi mendatang.

## 2) Pernikahan Dini

Pernikahan dini juga merupakan faktor sosial yang signifikan yang mempengaruhi pendidikan di Pasaman Barat. Banyak anak perempuan, terutama di daerah pedesaan, dipaksa untuk menikah pada usia muda, sering kali sebelum menyelesaikan pendidikan mereka. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sekitar 15% perempuan di Pasaman Barat menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini tidak hanya menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik tetapi juga meningkatkan risiko kemiskinan dan ketidakberdayaan di masa depan.

## 2. Upaya mengatasi Problematika Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Pasaman Barat

### a. Perbaikan Sistem Tenaga Pendidik

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pasaman Barat, perbaikan sistem tenaga pendidik sangatlah penting. Salah satu langkah strategis adalah memberikan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Data menunjukkan bahwa banyak guru enggan bertugas di daerah tersebut karena kurangnya insentif dan dukungan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru honorer juga harus menjadi prioritas. Menurut laporan dari Lembaga Penelitian Pendidikan Indonesia, sekitar 70% guru honorer di Pasaman Barat menerima gaji yang jauh di bawah standar upah minimum. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi guru, diharapkan mereka dapat mengajar dengan lebih baik dan lebih termotivasi untuk berkontribusi pada perkembangan pendidikan di daerah tersebut.

### b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Mengadakan kampanye edukasi untuk orang tua mengenai manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka dapat membantu mengubah pandangan tradisional yang masih ada di masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 30% anak-anak di Pasaman Barat tidak melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dukungan dari orang tua. Selain itu, memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu, seperti beasiswa atau subsidi untuk kebutuhan pendidikan, dapat membantu meringankan beban ekonomi dan mendorong mereka untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan akan meningkat, dan partisipasi dalam sistem pendidikan juga akan bertambah.

### **c. Penguatan Kebijakan dan Pengawasan**

Penguatan kebijakan dan pengawasan dalam sektor pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua program dan anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dan fasilitas belajar adalah langkah awal yang krusial. Menurut laporan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, alokasi anggaran untuk pendidikan masih jauh dari cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selain itu, memperketat pengawasan terhadap penerapan kebijakan pendidikan dan penggunaan dana bantuan juga sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan.

### **d. Integrasi Teknologi dalam Pendidikan**

Integrasi teknologi dalam pendidikan merupakan langkah strategis lainnya yang perlu diterapkan di Pasaman Barat. Meningkatkan akses internet di seluruh wilayah Pasaman Barat akan membuka peluang bagi siswa untuk mengakses informasi dan sumber belajar secara online. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% rumah tangga di Pasaman Barat memiliki akses internet, sehingga banyak siswa terhambat dalam proses pembelajaran mereka. Selain itu, melatih guru dan siswa untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran adalah langkah penting agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, proses belajar mengajar akan menjadi lebih interaktif dan menarik, serta membantu siswa memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang siap bersaing dalam era digital global.

## **Simpulan**

Dari pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang memadai, kesenjangan ekonomi masyarakat, serta kebijakan dan pengawasan yang belum optimal merupakan tantangan signifikan yang harus diatasi. Keterbatasan infrastruktur pendidikan, seperti kurangnya fasilitas dan kondisi bangunan yang tidak layak, menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, distribusi guru yang tidak merata dan kompetensi yang belum optimal juga berdampak pada kualitas pendidikan. Ditambah dengan faktor sosial dan budaya, seperti pandangan tradisional dan pernikahan dini, membuat situasi pendidikan di daerah ini semakin kompleks. Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Pasaman Barat, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan infrastruktur, perbaikan sistem tenaga pendidik, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kebijakan dan pengawasan, serta integrasi teknologi dalam pendidikan. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan. Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah kunci untuk

menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat.

### Daftar Pustaka

- Bakry, A. (2020). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Dewi, U. N. M. (2018). Kebijakan KJRI Johor Bahru Dalam Mengatasi Permasalahan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia. *SOSIAL POLITIK & EKONOMI*.
- Disas, E. P. (2018). Link and match sebagai kebijakan pendidikan kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2), 231-242.
- Esparza, M. A. O. (2019). An eco-system architectural model for delivering educational services to children with learning problems in basic mathematics. *International Journal of Information Technologies and Systems Approach*, 12(2), 61–81. <https://doi.org/10.4018/IJITSA.2019070104>
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278-297.
- Finogenov, A. A. (2020). On a solution to the “cheaters” and “consultants” problem within online educational service. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 13(11), 3849–3854. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85097866843&origin=inward>
- Huda, N. A., & Sasana, H. (2023). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 233-245.
- Indriyany, I. A. (2022). Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 2(1), 1-20.
- Lenak, S. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Governance*, 1(1).
- Mahardhani, A. J. (2021). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 137-155.
- Novarisa, G., Fadhil, M., & Fadhel, M. (2023). Masalah Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Era Digital Perspektif Komunikasi (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Padang). *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 7(2), 140-150.
- Salamun, A., & Sauri, S. (2023). Isu dan Masalah dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01).
- Sukatin, S., Nuraini, N., Azzahra, A. C., Yunita, F. R., & Fransiska, S. (2022). Manajemen pelayanan publik di pendidikan tinggi. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora*, 1(2), 70-78.

- 
- Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 4(2), 207-220.
- Sutapa, M. (2018). Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 112408.
- Sofanudin, A. (2019). Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas. *Penamas*, 32(1), 503-518.
- Tabuni, D., Rumapea, P., & Areros, W. A. (2019). Implementasi kebijakan otonomi khusus (studi kasus tentang pelayanan publik bidang pendidikan) di Kabupaten Lanny Jaya provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(043).
- Ulya, V. F. (2018). Pendidikan Islam di Indonesia: Problem Masa Kini dan Perspektif Masa Depan. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 136-150.
- Wenda, I., Mamentu, M., & Potabuga, J. (2017). Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545-551.